

KONTRIBUSI ORGANISASI NIRLABA DALAM MENGELOLA PROGRAM DAKWAH BERKELANJUTAN

Baqiya Aini Wahyu Ningtyas¹, Nuryati², Parjono², Meity Suryandari⁴

^{1,2,3,4} Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[¹baqiyaainiwn@gmail.com](mailto:baqiyaainiwn@gmail.com), [²Pandjinuryati123@gmail.com](mailto:Pandjinuryati123@gmail.com),

[³parjono010268@gmail.com](mailto:parjono010268@gmail.com), [⁴meyti@iai-alzaytun.ac.id](mailto:meyti@iai-alzaytun.ac.id)

ABSTRACT

Research This research discusses the contribution of non-profit organizations in managing da'wah programs program. Non-profit organizations have an important role in achieving social goals without focusing on financial gain. without focusing on financial gain. Through the implementation of accountability, transparency, and non-financial incentive systems, non-profit organizations are able to maintain the sustainability of the da'wah program. non-profit organizations are able to maintain the sustainability of the da'wah program. This research uses literature study method to analyze the literature from 2019 to 2024 related to the management of non-profit organizations in supporting da'wah programs. da'wah program. The results showed that effective management through accounting mechanisms, external supervision, and employee motivation can strengthen the success of sustainable strengthen the success of sustainable da'wah programs.

Keywords: non-profit organization, sustainable proselytization, accountability

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kontribusi organisasi nirlaba dalam mengelola program dakwah berkelanjutan. Organisasi nirlaba memiliki peran penting dalam mencapai tujuan sosial tanpa berfokus pada keuntungan finansial. Melalui penerapan akuntabilitas, transparansi, dan sistem insentif non-finansial, organisasi nirlaba mampu menjaga keberlanjutan program dakwah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka untuk menganalisis literatur dari tahun 2019 hingga 2024 yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi nirlaba dalam mendukung program dakwah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif melalui mekanisme akuntansi, pengawasan eksternal, dan motivasi karyawan dapat memperkuat keberhasilan program dakwah berkelanjutan.

Kata Kunci: organisasi nirlaba, dakwah berkelanjutan, akuntabilitas

A. Pendahuluan

Organisasi nirlaba memainkan peran penting dalam mengelola program dakwah berkelanjutan. Menurut (Hansmann, 2021),

organisasi nirlaba didirikan untuk mencapai tujuan sosial, bukan untuk menghasilkan keuntungan bagi individu. Organisasi ini berperan dalam menyelenggarakan berbagai

layanan, termasuk dakwah, yang berfokus pada kepentingan sosial dan agama (Salamon, 2020). Dalam konteks ini, transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam mempertahankan kepercayaan publik serta keberlanjutan program.

Keberhasilan program dakwah sangat bergantung pada pengelolaan yang baik, terutama dalam hal keuangan dan sumber daya manusia. Akuntansi yang transparan memungkinkan organisasi nirlaba memisahkan dana sesuai dengan tujuannya, seperti yang dijelaskan oleh (Weisbrod, 2019). Dana yang diterima melalui sumbangan harus dikelola dengan tepat untuk memastikan keberlanjutan program dakwah. Menurut (Boris & Steuerle, 2021), penggunaan dana publik dan hibah harus dipertanggungjawabkan melalui laporan yang jelas dan akurat. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia, baik karyawan maupun relawan, sangat penting dalam menjaga kelangsungan program dakwah. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 2020) menyatakan bahwa manajemen yang efektif melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Pemberian insentif non-

finansial seperti pengakuan dan pengembangan profesional dapat memotivasi karyawan untuk tetap berkomitmen pada misi organisasi (Johnson & Lee, 2022).

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*), yaitu pendekatan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik tentang kontribusi organisasi nirlaba dalam mengelola program dakwah berkelanjutan. Fokus dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana organisasi nirlaba mendukung program dakwah secara berkelanjutan melalui prinsip-prinsip manajemen yang efektif. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari sumber-sumber literatur yang relevan, seperti Jurnal ilmiah, buku ilmiah, Artikel ilmiah dan laporan penelitian. Adapun proses pengumpulan data meliputi pencarian literatur melalui basis data ilmiah seperti Google Scholar, ProQuest, dan jurnal yang diterbitkan oleh lembaga akademik. Setiap literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan tema yang dibahas, serta kredibilitas sumber yang digunakan. Populasi penelitian ini adalah literatur yang membahas organisasi nirlaba dan

dakwah, terutama yang diterbitkan dalam kurun waktu 2019-2024. Dari populasi ini, sampel dipilih berdasarkan kriteria: Literatur yang berfokus pada pengelolaan keuangan, transparansi, akuntabilitas, dan insentif non-finansial di organisasi nirlaba, serta penelitian yang membahas program dakwah berkelanjutan yang dijalankan oleh organisasi nirlaba di berbagai negara, terutama di Indonesia. Analisis data dilakukan dengan menyaring dan mengkategorikan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber literatur yang relevan. Proses ini melibatkan penilaian sistematis terhadap informasi yang ada untuk menarik kesimpulan mengenai peran organisasi nirlaba dalam mengelola dakwah berkelanjutan. Data yang telah dikategorikan kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema, dan kesimpulan yang dapat memberikan wawasan tentang kontribusi organisasi nirlaba dalam menjaga keberlanjutan program dakwah melalui penerapan prinsip manajemen yang efektif.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Organisasi Nirlaba

Pengertian organisasi nirlaba menurut *Internal Revenue Code (IRC)*

sections 501 menjelaskan bahwa organisasi nirlaba adalah organisasi yang tidak diperbolehkan mendistribusikan aset maupun pendapatannya untuk keuntungan pribadi pegawai, pimpinan, atau anggotanya. Organisasi ini didirikan untuk melayani masyarakat umum melalui berbagai layanan dan produk, yang keuntungannya dipergunakan kembali untuk mendukung tujuan organisasi, bukan kepentingan individu (IRC 501, 2020). Menurut (Hansmann, 2021), organisasi nirlaba adalah entitas yang didirikan dengan tujuan utama untuk mencapai misi sosial, dan bukan untuk menciptakan keuntungan bagi pemegang saham atau pihak-pihak terkait. Keunikan dari organisasi nirlaba terletak pada struktur keuangannya, di mana pendapatan yang diperoleh melalui jasa atau sumbangan digunakan untuk kepentingan sosial, bukan untuk meningkatkan ekuitas individu atau kelompok.

Salamon (2020) juga menyatakan bahwa organisasi nirlaba adalah bagian dari sektor ketiga yang memiliki peran signifikan dalam memobilisasi sumber daya untuk pelayanan sosial. Salamon mengidentifikasi peran organisasi nirlaba sebagai pelengkap dari sektor

pemerintah dan swasta dalam memberikan layanan yang sering kali diabaikan oleh dua sektor tersebut. Organisasi nirlaba sering beroperasi di bidang seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan layanan kemanusiaan, di mana mereka menyediakan solusi untuk berbagai masalah sosial (Salamon, 2020). Organisasi nirlaba, seperti yang disebutkan oleh (Weisbrod, 2019), tidak berfokus pada pengumpulan keuntungan, melainkan pada penggunaan sumber daya yang dihasilkan untuk mencapai tujuan organisasi. Weisbrod menjelaskan bahwa, meskipun beberapa organisasi nirlaba menghasilkan pendapatan melalui produk atau layanan seperti tiket acara atau sumbangan, seluruh keuntungan yang diperoleh harus dikembalikan ke organisasi untuk mendukung misinya, bukan dibagi kepada individu yang terlibat dalam operasionalnya. Dalam konteks pendanaan, organisasi nirlaba sering kali mengandalkan berbagai sumber, mulai dari layanan yang diberikan, sumbangan publik, hingga dukungan dari pemerintah dalam bentuk hibah atau subsidi. Sebagai contoh, subsidi pemerintah untuk pendidikan atau layanan kesehatan menjadi salah satu cara

untuk mendukung keberlangsungan organisasi nirlaba yang berfokus pada sektor tersebut (Boris & Steuerle, 2021).

Pengertian Dakwah

(Hidayat, 2021) menyatakan bahwa dakwah adalah proses menyampaikan ajaran Islam kepada individu atau kelompok dengan cara yang bijaksana, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan kemampuan serta situasi audiens. Tujuan utama dakwah adalah mengajak umat untuk berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Hal ini dilakukan dengan mengedepankan pendekatan yang lembut agar pesan dakwah dapat diterima dengan baik oleh masyarakat.

Adapun (Arifin, 2023) mendefinisikan dakwah sebagai sebuah aktivitas yang bukan hanya berfokus pada penyebaran ajaran agama, tetapi juga berfungsi sebagai sarana untuk membangun moralitas sosial dan memperkuat hubungan sosial di dalam komunitas. Dakwah di sini dimaknai sebagai transformasi sosial yang bertujuan memperbaiki kehidupan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Sedangkan (Nashruddin, 2022) menekankan bahwa dakwah adalah sebuah komunikasi dua arah yang mengharuskan adanya interaksi dan respon dari audiens. Dalam pengertian ini, dakwah tidak hanya berbicara soal penyampaian ajaran, tetapi juga bagaimana pesan diterima, dipahami, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sehingga dari tiga pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa adalah proses komunikasi yang bertujuan menyebarkan ajaran Islam dengan pendekatan yang penuh hikmah dan kasih sayang, yang tidak hanya bersifat vertikal (antara pendakwah dan Tuhan), tetapi juga horizontal (antara pendakwah dan masyarakat). Dakwah dipahami sebagai alat untuk membangun moralitas dan memperbaiki kondisi sosial, dengan tetap memperhatikan respon dari audiens sehingga pesan agama bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Ciri-Ciri Organisasi Nirlaba

Ciri-ciri organisasi nirlaba dapat dilihat dari beberapa aspek utama yang membedakannya dari organisasi laba. Berikut adalah beberapa ciri khusus organisasi nirlaba:

1. Sumber daya berasal dari sumbangan tanpa imbal balik.
Sumber daya utama organisasi nirlaba berasal dari sumbangan pihak luar, seperti individu, lembaga, atau pemerintah, yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Para penyumbang tersebut memberikan dukungan finansial atau material dengan tujuan membantu mencapai misi sosial atau tujuan layanan publik organisasi nirlaba. Sumbangan ini mencerminkan prinsip dasar nirlaba, yaitu pelayanan tanpa memikirkan keuntungan pribadi (Frumkin & Kim, 2019).
2. Tujuan bukan untuk menghasilkan laba.
Organisasi nirlaba didirikan untuk memproduksi barang dan jasa yang bertujuan melayani masyarakat tanpa maksud memupuk keuntungan finansial. Jika organisasi ini menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut tidak dibagikan kepada pendiri, pengurus, atau anggota.

Sebaliknya, seluruh pendapatan yang diperoleh digunakan kembali untuk mendukung dan memperluas layanan atau tujuan sosial yang diemban oleh organisasi tersebut. Hal ini memastikan bahwa fokus utama organisasi adalah pencapaian misi, bukan distribusi keuntungan kepada pihak-pihak yang terlibat (Salamon, 2020).

3. Tidak ada kepemilikan yang dapat diperjualbelikan.

Tidak seperti organisasi bisnis yang memiliki kepemilikan saham atau ekuitas yang dapat dijual atau dipindahkan, organisasi nirlaba tidak memiliki konsep kepemilikan yang dapat dialihkan atau dijual kepada pihak lain. Ini berarti bahwa aset atau sumber daya yang dimiliki organisasi nirlaba tidak dapat dijual atau ditebus oleh para pendiri atau pemegang saham. Ketika organisasi ini dilikuidasi atau dibubarkan, sumber daya yang tersisa umumnya disalurkan ke organisasi lain yang memiliki tujuan serupa, bukan dibagikan kepada para pendiri atau pengurus (Anheier, 2022).

Dengan demikian, organisasi nirlaba memiliki karakteristik unik yang menjadikannya berbeda dari organisasi bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk melayani kepentingan sosial atau publik, bukan untuk keuntungan pribadi. Kepemilikan sumber daya yang terbatas dan ketergantungan pada sumbangan tanpa imbal balik juga merupakan aspek penting yang menegaskan peran sosial yang dimainkan oleh organisasi ini.

Ambiguitas Tujuan dan Konflik

Managemen control system (MCS) harus dirancang sedemikian rupa untuk dapat mencapai tujuan organisasi. Hal ini perlu didukung dengan adanya tujuan dan sasaran yang jelas dari organisasi nirlaba. Salah satu contoh pada organisasi laba yaitu pada perusahaan Anglo-Amerika yang memiliki tujuan umum utamanya difokuskan pada pemaksimalan nilai pemegang saham untuk beberapa batasan dan kepentingan stakeholder lainnya. Penilaian pencapaian tujuan dapat dilihat dari umpan balik dan memantau kinerja saham perusahaan dan membandingkan dengan pesaing pasar secara keseluruhan (Kaplan & Norton, 2020).

Contoh di atas dapat menunjukkan tingkat kejelasan organisasi laba. Namun, pada organisasi nirlaba, seringkali terdapat ambiguitas dalam penetapan tujuan. Ketiadaan kejelasan ini sering menyebabkan konflik internal karena berbagai pihak memiliki tujuan yang berbeda-beda (Brown & Sikes, *Managing Conflicts in Nonprofit Organizations: A Framework for Clarity and Coordination*, 2021). Misalnya, sebuah museum sebagai organisasi nirlaba memiliki berbagai konstituen dengan kepentingan yang berbeda. Dewan pengawas mungkin fokus pada misi untuk menginspirasi masyarakat melalui koleksi dan pameran seni berkualitas tinggi. Sebaliknya, masyarakat umum dan pejabat pemerintah mungkin lebih tertarik pada aspek hiburan dan aksesibilitas pameran, sementara tokoh agama mungkin lebih memprioritaskan nilai-nilai sosial dan moral dari seni yang dipamerkan. Perbedaan persepsi dan prioritas ini dapat menyebabkan konflik yang signifikan (Hall, 2019).

Untuk mengatasi ambiguitas tujuan dan konflik ini, organisasi nirlaba perlu merancang mekanisme pengambilan keputusan yang efektif dan transparan. Tanpa kejelasan

dalam tujuan dan metode pencapaiannya, akan sulit untuk menilai efektivitas sistem kontrol dan kinerja manajerial. Organisasi nirlaba harus merancang sistem kontrol yang sesuai dengan hukum, kebijakan, dan kondisi lingkungan tempat mereka beroperasi, serta memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dapat dipahami dan diterima oleh semua pihak terkait (Jackson, 2022).

Pengukuran Kinerja Dalam Organisasi Nirlaba

Setiap organisasi menetapkan pengukuran kinerja yang dirancang khusus untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan mereka tercapai. Untuk menilai kinerja secara efektif, indikator kinerja yang jelas dan terukur perlu ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, organisasi nirlaba sering menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan indikator kinerja tersebut. Salah satu permasalahan utama adalah ketidakmampuan manajer untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan, seperti keuntungan finansial, serta kurangnya langkah-langkah pemulihan yang jelas ketika target tidak tercapai. Ini membuat evaluasi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan menjadi sulit,

terutama dalam konteks non-finansial (Pereira, Silva, & Costa, 2021).

Contoh nyata dari masalah ini dapat ditemukan di rumah sakit. Jika tujuan utama rumah sakit adalah menyembuhkan pasien, bagaimana kita dapat menilai kesuksesan pencapaian tujuan tersebut? Tanpa indikator kinerja yang tepat, sulit untuk menilai efektivitas layanan dan hasil pengobatan (Harrison & John, *Measuring Healthcare Outcomes: Approaches and Challenges*, 2022). Oleh karena itu, penting untuk menetapkan indikator kinerja yang memungkinkan evaluasi objektif terhadap pencapaian tujuan.

Tanpa adanya indikator yang jelas, pengelolaan dan pengendalian manajemen menjadi lebih rumit. Beberapa tantangan yang muncul antara lain:

1. Mengukur Kinerja Organisasi:
Tanpa indikator yang tepat, sulit untuk mengukur kinerja organisasi dalam segala aspek tujuannya dan menerapkan kontrol hasil, termasuk insentif berbasis kinerja pada tingkat organisasi yang lebih luas (Liu, Zhang, & Chen, 2023).
2. Menganalisis Manfaat Investasi: Evaluasi manfaat dari investasi atau alternatif

tindakan menjadi kompleks tanpa indikator yang jelas, membuatnya sulit untuk menentukan langkah-langkah yang paling efektif (Smith & Lee, *Evaluating Investment Decisions in Nonprofit Organizations: Challenges and Solutions*, 2020).

3. Mendesentralisasi Organisasi:
Tanpa indikator kinerja, tanggung jawab manajer dalam kinerja area tertentu yang terkait dengan tujuan utama organisasi menjadi tidak terukur (Zhou & Wu, 2019).
4. Membandingkan Kinerja:
Perbandingan kinerja di berbagai kegiatan menjadi tidak efektif tanpa standar pengukuran yang konsisten (Johnson & Kim, 2021).

Pada organisasi nirlaba, perhatian terhadap ukuran kinerja sering kali kurang, yang dapat mengakibatkan kritik terhadap dewan direksi atau pengurus. Kurangnya ukuran kinerja menyebabkan ketidakmampuan dalam menentukan prioritas dan tujuan yang paling penting untuk dicapai (Green & Foster, 2022).

Dalam beberapa tahun terakhir, perhatian terhadap

pengukuran kinerja dalam organisasi pelayanan publik dan penyebaran data kepada masyarakat telah meningkat. Hal ini bertujuan untuk melengkapi langkah-langkah input fokus tradisional (seperti tingkat belanja staf) dengan langkah-langkah berorientasi hasil (seperti output, kualitas, dan ketepatan waktu), sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah dalam meningkatkan tanggung jawab (Adams & Brown, 2024). Namun, peningkatan fokus pada pengukuran kinerja dapat juga menghasilkan beberapa masalah disfungsi pada organisasi nirlaba. Masalah ini termasuk perpindahan perilaku, di mana fokus beralih pada area yang diukur sambil mengesampingkan area penting lainnya yang tidak terukur, serta permainan data, yaitu manipulasi atau kesalahan dalam pelaporan data (Williams & Roberts, 2023).

Pengawasan Eksternal

Organisasi nirlaba memiliki tanggung jawab yang signifikan terhadap sejumlah konstituen eksternal, termasuk sumbangan pemerintah, alumni, dan masyarakat umum. Laporan kinerja yang transparan dan informatif sangat

penting untuk membantu konstituen membuat keputusan yang tepat mengenai keterlibatan mereka dengan organisasi tersebut. Misalnya, situs web seperti Charity Navigator (www.charitynavigator.org) berfungsi sebagai "American Premier Independent Charity Evaluator" yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pasar filantropi dengan mengevaluasi kesehatan keuangan lebih dari 5.500 amal terbesar di Amerika Serikat (Charity Navigator, 2023). Platform seperti ini memungkinkan donor untuk membuat keputusan yang lebih terinformasi tentang di mana mereka akan menyumbangkan uang mereka, apakah untuk sekolah anak-anak mereka, rumah sakit, atau organisasi amal. Tingginya harapan masyarakat terhadap transparansi dan akuntabilitas organisasi nirlaba berarti bahwa ada tuntutan tinggi untuk pertanggungjawaban. Jika organisasi nirlaba terlibat dalam tindakan yang menyimpang dari tujuan mereka, atau jika ada ketidakpatuhan terhadap standar yang ditetapkan, maka organisasi tersebut berisiko mengalami reaksi negatif dari pihak eksternal. Pengawasan eksternal menambahkan lapisan kontrol tambahan untuk memastikan bahwa

organisasi nirlaba, khususnya yang berkaitan dengan dana publik atau hibah pemerintah, memenuhi tanggung jawab fiskal dan operasional mereka dengan baik (Wagner K. , 2021)

Namun, salah satu masalah signifikan yang dihadapi organisasi nirlaba adalah pemilihan anggota dewan yang sering kali dilakukan tanpa syarat dan kualifikasi yang memadai. Hal ini dapat mengakibatkan pengawasan yang kurang efektif dan menurunnya kinerja organisasi. Ketika pengawasan internal gagal, pengawasan eksternal dari konstituen dapat memberikan tekanan langsung pada organisasi untuk memperbaiki masalah yang ada (Smith & Johnson, 2022). Michael Delucia, direktur badan amal dan asisten senior jaksa agung di kantor Kejaksaan Agung New Hampshire, menyoroti kekhawatiran terkait kurangnya pengawasan di sektor amal. Menurut Delucia, "Pada sektor amal, kecenderungannya adalah untuk menjadi lebih percaya dan kurang pengawasan. Orang-orang tampak lebih percaya dan memiliki kontrol internal serta pengawasan yang kurang di sektor amal" (Delucia, 2023). Kurangnya pengawasan ini menyoroti kelemahan dalam

organisasi nirlaba, di mana kepercayaan yang diberikan kepada anggota dewan harus diimbangi dengan tindakan yang bijaksana dan sesuai dengan tujuan organisasi untuk memastikan efektivitas dan akuntabilitas.

Kontribusi Organisasi Nirlaba dalam Mengelola Program Dakwah Berkelanjutan

Organisasi nirlaba memainkan peran penting dalam mengelola program dakwah berkelanjutan dengan memanfaatkan karakteristik, dan keunikan mereka untuk mencapai tujuan jangka panjang dan berkelanjutan.

1. Akuntansi dan Transparansi

Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi nirlaba dalam mengelola program dakwah adalah memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Laporan keuangan organisasi nirlaba berbeda dari laporan keuangan organisasi laba dalam hal bentuk dan isi. Standar akuntansi seperti Pernyataan Akuntansi Keuangan No. 117 (FAS 117) yang diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Keuangan Amerika Serikat pada tahun 1993, menetapkan pedoman untuk

laporan keuangan eksternal organisasi nirlaba. Standar ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan penyamaan laporan keuangan, yang sangat penting dalam mengelola dana untuk program dakwah (Financial Accounting Standards Board, 2023).

Organisasi nirlaba harus memisahkan dana berdasarkan tujuannya, menggunakan sistem akuntansi dana untuk memastikan bahwa setiap sumbangan digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, seperti kegiatan dakwah. Ini termasuk mengelola sumbangan yang mungkin dibatasi untuk tujuan tertentu, seperti pembangunan pusat dakwah atau pelatihan penyuluh agama (Wang & Yao, 2021). Dengan adanya sistem akuntansi yang transparan, organisasi nirlaba dapat mempertahankan kepercayaan donor dan memastikan bahwa dana yang diterima digunakan dengan efektif untuk program dakwah yang berkelanjutan.

2. Pengelolaan Karyawan dan Relawan

Karyawan dan relawan di organisasi nirlaba sering kali memiliki komitmen yang kuat

terhadap misi organisasi, termasuk dalam program dakwah. Karakteristik ini memungkinkan mereka untuk bekerja dengan tekun dan berdedikasi meskipun kompensasi finansial mungkin tidak sebesar di sektor laba. Oleh karena itu, manajemen organisasi nirlaba perlu menyelaraskan kebutuhan dan motivasi karyawan dengan tujuan dakwah, memberikan insentif non-finansial, dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung (Johnson & Lee, 2022). Hal ini membantu menjaga kualitas program dakwah dan memastikan keberlanjutannya.

3. Klarifikasi Tujuan dan Pengukuran Kinerja

Organisasi nirlaba yang menjalankan program dakwah berkelanjutan perlu menetapkan indikator kinerja yang jelas dan relevan untuk mengukur pencapaian tujuan mereka. Tanpa adanya indikator yang memadai, sulit untuk menilai efektivitas program dakwah dan memastikan bahwa sumber daya digunakan secara optimal. Oleh karena itu, penting bagi organisasi nirlaba untuk menerapkan sistem akuntansi dana dan melaporkan kinerja mereka secara transparan,

agar mereka dapat mengevaluasi dan meningkatkan program dakwah secara berkelanjutan (Wagner K. , 2021).

4. Pengawasan Eksternal dan Pertanggungjawaban

Organisasi nirlaba yang mengelola program dakwah juga menghadapi pengawasan eksternal dari donor, masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pengawasan ini memaksa organisasi untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan hasil program mereka. Keterbukaan informasi dan tanggung jawab terhadap konstituen eksternal membantu menjaga integritas program dakwah dan memastikan bahwa semua kegiatan sesuai dengan tujuan dan ekspektasi masyarakat (Delucia, 2023).

5. Sistem Insentif Non-Finansial

Karena kompensasi karyawan di organisasi nirlaba mungkin tidak sebesar di sektor laba, organisasi harus mengandalkan sistem insentif non-finansial untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan mereka. Ini bisa mencakup pengakuan, peluang pengembangan profesional, dan lingkungan kerja yang mendukung.

Sistem ini membantu menjaga karyawan yang berkomitmen dan memotivasi mereka untuk terus berkontribusi pada program dakwah dengan semangat yang tinggi (Johnson & Lee, 2022).

Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip akuntansi yang transparan, pengawasan eksternal yang ketat, karakteristik karyawan yang berdedikasi, dan sistem insentif non-finansial, organisasi nirlaba dapat secara efektif mengelola program dakwah berkelanjutan. Ini memastikan bahwa dana dan sumber daya digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan dakwah yang bermanfaat bagi masyarakat. Kita juga dapat menggunakan teknologi yang memungkinkan organisasi untuk lebih transparan dalam hal pelaporan keuangan, penggalangan dana, serta penyampaian pesan dakwah yang dapat diakses oleh berbagai kalangan. Sebagai contoh, media sosial dan aplikasi berbasis internet memungkinkan penyebaran informasi dakwah yang lebih cepat dan lebih luas, sejalan dengan tuntutan masyarakat modern yang semakin mengandalkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari (Fitriani, Mutakin, & Suryandari, 2022).

D. Kesimpulan

Organisasi nirlaba memiliki peran yang signifikan dalam mengelola program dakwah berkelanjutan melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan sumber daya manusia yang tepat. Pengelolaan keuangan yang akurat dan jelas sangat penting untuk mempertahankan kepercayaan donor dan mendukung keberlanjutan program dakwah. Selain itu, pengelolaan karyawan dan relawan dengan memberikan insentif non-finansial dapat meningkatkan dedikasi dan kinerja mereka dalam mencapai tujuan dakwah. Sistem pengawasan eksternal juga diperlukan untuk memastikan bahwa organisasi nirlaba tetap berpegang pada tujuan sosial dan menjalankan program dengan integritas yang tinggi. Dengan menerapkan pendekatan manajemen yang efektif dan akuntabel, organisasi nirlaba dapat memainkan peran yang lebih besar dalam mendukung program dakwah berkelanjutan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adams, R., & Brown, T. (2024). Enhancing Public Sector

Performance Measurement: Balancing Input and Output Metrics. *Public Administration Review*, 84(1), 112-129.

Anheier, H. K. (2022). *Nonprofit Organizations: Theory, Management, Policy*. Philadelphia: Routledge.

Ardhiansyah, D. (2019). Yayasan Kanker Indonesia: Peran dalam Pencegahan dan Pengobatan Kanker. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

Arifin, M. (2023). *Dakwah sebagai Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Dakwah Press.

Boris, E. T., & Steuerle, C. E. (2021). *Nonprofits and Government: Collaboration and Conflict*. Urban Institute Press.

Brown, T., & Miller, S. (2021). Managing Human Resources in Nonprofit Organizations. *Journal of Nonprofit Management*, 45(2), 120-135.

Brown, T., & Sikes, K. (2021). Managing Conflicts in Nonprofit Organizations: A Framework for Clarity and Coordination. *Journal of Nonprofit Management*, 25(3), 45-67.

Charity Navigator. (2023). Diambil kembali dari About Us. Retrieved from <https://www.charitynavigator.org>

Delucia, M. (2023). Challenges in Charity Oversight: A Senior AG Perspective. *Journal of Nonprofit Law & Policy*, 12(2), 45-59.

Fadilah, A. e. (2021). Palang Merah Indonesia: Peran Kemanusiaan dalam Bantuan

- Bencana dan Donor Darah. *Jurnal Kemanusiaan*.
- Financial Accounting Standards Board (FASB). (1993). *Statement of Financial Accounting Standards No. 117: Financial Statements of Not-for-Profit Organizations*. FASB.
- Fitriani, A., Mutakin, & Suryandari, M. (2022). Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Administrasi dan Manajemen Lembaga Dakwah. *Seroja: Jurnal Pendidikan*, 1 (2), 138-148.
- Frumkin, P., & Kim, M. (2019). Conflict and Ambiguity in Nonprofit Organizations: A Conceptual Analysis. *Nonprofit Management & Leadership*, 29(3), 379-398.
- Governmental Accounting Standards Board (GASB). (2019). *GASB Statement No. 34: Basic Financial Statements—and Management's Discussion and Analysis—for State and Local Governments*. GASB.
- Green, A., & Foster, M. (2022). Performance Measurement Challenges in Nonprofit Organizations: An Overview. *Nonprofit Quarterly*, 29(2), 55-72.
- Hall, M. (2019). Organizational Goals and Conflicts in Museums: A Review of Recent Trends. *Museum Management and Curatorship*, 34(1), 15-30.
- Hansmann, H. (2021). The Role of Nonprofit Enterprise. In Nonprofit Organizations. *The Yale Law journal*.
- Harrison, J., & John, A. (2022). Measuring Healthcare Outcomes: Approaches and Challenges. *Health Services Research*, 57(3), 345-362.
- Harrison, J., & John, A. (2022). Measuring Healthcare Outcomes: Approaches and Challenges. *Health Services Research*, 57(3), 345-362.
- Harsono, A. e. (2019). Kontras dan Advokasi HAM di Indonesia: Sebuah Analisis. *Jurnal Hak Asasi Manusia*.
- Hidayat, A. (2021). *Metode Dakwah di Era Modern*. Jakarta: Pustaka Dakwah.
- Internal Revenue Code sections 501. (2020).
- Jackson, R. (2022). Effective Management Control Systems for Nonprofit Organizations: Navigating Ambiguity and Conflict. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 51(4), 639-658.
- Johnson, L., & Kim, Y. (2021). Comparative Performance Measurement in Nonprofit Organizations: An Empirical Study. *Journal of Nonprofit Management*, 26(4), 78-94.
- Johnson, R., & Lee, K. (2022). Non-Financial Incentives in Nonprofit Organizations: Strategies for Employee Motivation. *International Journal of Nonprofit Studies*, 31(4), 234-249.
- Jones, A., & Lee, M. (2021). Fund Accounting in Nonprofit Organizations: Theory and Practice. *Journal of Nonprofit Management*, 26(3), 45-62.

- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2020). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Watertown: Harvard Business Review Press.
- Lee, O. L. (2019). *Manajemen: Seni dan Ilmu*. Jakarta: Pustaka Nasional.
- Liu, X., Zhang, Y., & Chen, H. (2023). The Role of Performance Indicators in Organizational Control Systems. *Management Accounting Research*, 45(2), 223-240.
- Martini, A. N. (2021). Beasiswa Supersemar: Kontribusi dan Kontroversi. *Jurnal Pendidikan Indonesia*.
- Nashruddin, F. (2022). *Komunikasi Efektif dalam Dakwah*. Bandung: Risalah Ilmu.
- Pereira, S., Silva, J., & Costa, A. (2021). The Impact of Performance Measurement Systems on Organizational Effectiveness. *Journal of Business Research*, 123, 456-470.
- Purnomo, B. (2021). Pro Fauna dan Perlindungan Satwa Liar di Indonesia. *Jurnal Konservasi*.
- Putra, R. e. (2021). Tim SAR dan Tanggap Darurat Bencana di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bencana*.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2021). *Management*. London: Pearson.
- Rohman, M. F. (2021). Peran Dompot Dhu'afa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Filantropi Islam*.
- Salamon, L. M. (2020). *The Resilient Sector Revisited: The New Shape of the Nonprofit Sector*. Washington: Brookings Institution Press.
- Saragih, P. (2022). Peran YLKI dalam Perlindungan Hak Konsumen di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*.
- Smith, A. (2020). Challenges in Nonprofit Management: A Case Study of Los Angeles County Health Mental Department. *Public Administration Review*, 80(1), 75-85.
- Smith, J., & Brown, T. (2023). Restricted Funds and Financial Management in Nonprofits. *Nonprofit Quarterly*, 31(2), 34-50.
- Smith, J., & Johnson, R. (2022). Governance and Accountability in Nonprofit Organizations. *Nonprofit Management Review*, 34(1), 78-92.
- Smith, J., & Lee, S. (2020). Evaluating Investment Decisions in Nonprofit Organizations: Challenges and Solutions. *Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly*, 49(1), 89-106.
- Stoner, J. F., Freeman, R. E., & Gilbert, D. R. (2020). *Management*. Jakarta: Pearson Education.
- Sudibya, E. (2020). WALHI dan Perjuangan Keadilan Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Lingkungan Hidup*.
- Wagner, K. (2021). External Oversight and Accountability in Nonprofit Sector. *International Journal of Nonprofit Studies*, 29(3), 102-117.
- Wagner, K. (2022). Accounting Practices in Nonprofit

- Organizations: A Comparative Study. *International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing*, 27(4), 120-135.
- Wahid, A. (2020). Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat: Studi Kasus YDSF. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Wang, H., & Yao, Z. (2021). Accounting for Nonprofits: Managing Donor Funds and Reporting Standards. *Journal of Nonprofit Accounting*, 29(3), 102-117.
- Weisbrod, B. (2019). *The Nonprofit Economy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Williams, M., & Roberts, P. (2023). Dysfunctional Behavior in Performance Measurement Systems: Insights from Nonprofits. *Journal of Organizational Behavior*, 44(2), 233-249.
- Zhou, Z., & Wu, X. (2019). Decentralization and Performance Management: Evidence from Nonprofit Organizations. *Nonprofit Management & Leadership*, 30(1), 35-50.